

## Supersemar, Guru Kehidupan

**H**ARI Jumat 11 Maret 1966, Sidang Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan terpaksa diakhiri sebelum waktunya. Presiden Soekarno yang baru saja membuka sidang langsung menyelesaikan sambutannya dan cepat-cepat terbang ke Istana Bogor. Saat itu tersiar kabar ada sekelompok pasukan tak dikenal tanpa mengenakan atribut sedang bergerak di sekitar Monas. Sore harinya, tiga orang jenderal yaitu Basuki Rachmat, Amirmachmud, dan M Jusuf datang menemui Bung Karno di Istana Bogor. Mereka berhasil meyakinkan Bung Karno untuk mengeluarkan suatu surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengamankan situasi yang semakin memanas. Ini sekelumit kronologi yang melatarbelakangi lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar atau SP 11 Maret).

Kini sudah 48 tahun peristiwa tersebut berlalu. Supersemar pernah menjadi 'pujaan' karena disebut sebagai tonggak sejarah lahirnya Orde Baru. Suatu masa pemerintahan yang bercita-cita melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru pernah mengalami kejayaan, namun dengan bergulirnya gerakan Reformasi telah menghapus semua jejaknya. Demikian pula dengan nasib Supersemar. Di masa Reformasi, persepsi mengenai Supersemar berbalik 180 derajat. Supersemar dianggap kebohongan penguasa. Berbagai analisis hampir semuanya sepakat Supersemar itu palsu. Buktinya, paling tidak, terdapat tiga versi Supersemar yang semuanya diakui sebagai versi asli. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan pula bila ketiganya palsu. Tuduhan lantas dilayangkan kepada Pak Harto, sang penerima Supersemar, yang dianggap telah menyalahgunakan Supersemar menjadi alat untuk merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan Bung Karno.

Tidak seluruhnya analisis itu benar, namun tidak juga semuanya salah. Memang usai surat itu ditandatangani dan kemudian diterima oleh Letjen Soeharto, jalan politik Indonesia berubah drastis. Letjen Soeharto segera membubarkan PKI dan menangkap 15 orang menteri yang dituduh terlibat dalam Gerakan 30 Sep-

### Hendra Kurniawan

tember 1965. Tidak dapat dipungkiri tindakan ini secara perlahan telah memangkas kekuasaan Bung Karno. Kebijakan politik non teknis militer yang semestinya menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan sejak itu dapat diputuskan oleh Letjen Soeharto selaku Panglima AD/Pangkopkamtib atas dasar Supersemar. Pertimbangan Letjen Soeharto saat itu demi memenuhi tuntutan masyarakat agar kondisi yang serba kacau dapat segera pulih.

Meskipun ada banyak versi, namun keberadaan Supersemar bukanlah cerita karangan. Bung Karno dalam pidatonya berjudul 'Jangan

kan bahwa Supersemar bukanlah suatu pengalihan kekuasaan (*transfer of authority*). Supersemar merupakan suatu perintah pengamanan jalannya pemerintahan, keselamatan, wibawa, dan ajaran presiden.

Pada kenyataannya Supersemar kemudian dijadikan alat untuk melegalkan setiap keputusan politik yang diambil Letjen Soeharto atas nama presiden. Patut disayangkan pula saat itu Soeharto tidak pernah berkonsultasi maupun melaporkan segala tindakannya kepada presiden. Sejak itulah terjadi dualisme kepemimpinan nasional, yaitu antara Bung Karno yang masih menjabat sebagai presiden dan Soeharto sebagai pengemban Supersemar.

Supersemar yang awalnya hanyalah surat perintah dari presiden telah menjadi benar-benar 'super'. Apalagi setelah Supersemar disahkan melalui Tap MPRS Nomor IX/MPRS/ 1966, di situlah titik balik kekuasaan Bung Karno resmi dimulai. Harus diakui bahwa dengan keluarnya Supersemar, maka pemerintahan Orde Lama memasuki masa-masa akhir usianya. Sebaliknya bagi Orde Baru, Supersemar menjadi tonggak awal pemerintahan baru negara ini. Meskipun demikian, Supersemar tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi berdirinya suatu pemerintahan. Apalagi menilik maksud sesungguhnya dari surat perintah tersebut. Ini berarti sejarah Supersemar selama ini telah dibalut berbagai kepentingan politik. Untuk itulah perlu menempatkan kembali Supersemar sebagai bagian dari sejarah perjalanan bangsa ini secara bebas dan objektif. Supersemar harus dibersihkan dan dikenalkan kembali pada generasi penerus. Sejatinya sejarah bukanlah alat politik, sejarah adalah guru kehidupan. □ - s.

\*) **Hendra Kurniawan MPd**,  
Dosen Pendidikan Sejarah Universitas  
Sanata Dharma Yogyakarta.



KR-JOKO SANTOSO

Sekali-kali Meninggalkan Sejarah (Jasmerah) tanggal 17 Agustus 1966 dengan tegas menyatakan Supersemar memang dikeluarkannya untuk mengatasi keadaan dan memulihkan krisis politik saat itu. Fakta ini mematahkan dugaan bahwa Supersemar dikeluarkan oleh Bung Karno karena paksaan di bawah tolongan senjata. Dalam pidatonya tersebut bahkan Bung Karno juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Letjen Soeharto karena telah melaksanakan Supersemar dengan baik. Akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan, masih dalam pidato tersebut, Bung Karno menegaskan